



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
UNIT KERJA : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : RONY AGUSTIAN FAREKI
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 104812

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	2.155.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 98 m2/105 m2 di KAB / KOTA KOTA MATARAM , HASIL SENDIRI Rp. 755.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 240 m2/240 m2 di KAB / KOTA KOTA MATARAM , HASIL SENDIRI Rp. 1.400.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	5.500.000
1. MOTOR, YAMAHA SE 88 SEPEDA MOTOR /SOLO Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 5.500.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	73.110.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	600.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	2.234.210.000

III. HUTANG **Rp.** **180.000.000**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) **Rp.** **2.054.210.000**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.



3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
UNIT KERJA : BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SUBHAN HASAN
2. Jabatan : KEPALA BIRO
3. NHK : 443587

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.000.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/150 m2 di KAB / KOTA LOMBOK BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 215.000.000

1. MOBIL, SUZUKI SWIFF STACION Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000
2. MOBIL, SUZUKI BALENO STACION Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 140.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 7.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 754.325

F. HARTA LAINNYA Rp. ---

Sub Total Rp. 1.222.754.325

III. HUTANG Rp. 209.150.756

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.013.603.569

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.



3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 9 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
UNIT KERJA : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : I MADE GANIA
2. Jabatan : SEKRETARIS
3. NHK : 100134

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.160.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 196 m2/150 m2 di KOTA MATARAM ,
HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 96 m2/29 m2 di LOMBOK BARAT,
HASIL SENDIRI Rp. 160.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 206 m2/130 m2 di KOTA MATARAM ,
HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 86.000.000

1. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp.
13.000.000
2. MOBIL, TOYOTA MINIBUS Tahun 1996, HASIL SENDIRI Rp.
30.000.000
3. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp.
13.000.000
4. MOBIL, TOYOTA MINIBUS Tahun 1996, HASIL SENDIRI Rp.
30.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 28.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 26.882.468

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.300.882.468

III. HUTANG Rp. 9.378.213

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.291.504.255

Catatan:



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 9 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
UNIT KERJA : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MUSA EL JALALILHAM
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 86239

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	----
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	10.000.000
1. MOTOR, VARIO125 SEPEDA MOTOR Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	30.800.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	1.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	41.800.000

III. HUTANG Rp. 118.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. -76.200.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
UNIT KERJA : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : PITER UMBU LOLI NDAPA MEDE
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 93113

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	530.000.000
1. Tanah Seluas 403 m2 di KAB / KOTA LOMBOK BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 110 m2/36 m2 di KAB / KOTA KOTA MATARAM , HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	----
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	13.300.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	7.100.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	550.400.000
III. HUTANG	Rp.	400.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	150.400.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.